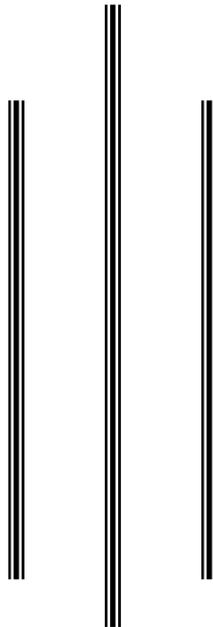




**RENCANA STRATEGIS  
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH  
(RENSTRA-SKPD) KELURAHAN BOJONGBATA  
TAHUN 2011 - 2016**



PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG  
KECAMATAN PEMALANG KELURAHAN BOJONGBATA  
TAHUN 2011 - 2016

## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	ii
BAB I      PENDAHULUAN .....	1
1.1      Latar belakang .....	1
1.2      Landasan Hukum .....	2
1.3      Maksud dan Tujuan .....	3
1.4      Sistematika Penulisan .....	5
BAB II     GAMBARAN PELAYANAN SKPD.....	6
2.1     Tugas,Fungsi dan Struktur Organisasi SKPD .....	6
2.2     Sumber Daya SKPD .....	8
2.3     Kinerja Pelayanan SKPD .....	10
2.4     Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD .....	10
BAB III    ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI .....	11
3.1    Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas Dan Fungsi Pelayanan SKPD .....	11
3.2    Telaahan Visi,Misi, dan Program Kepala Daerah Dan Wakil Kepala daerah Terpilih .....	13
3.3    Penentuan Isu-isu Strategis .....	15
BAB IV    VISI,MISI,TUJUAN, DAN SASARAN,STRATEGIS DAN KEBIJAKAN .....	16
4.1    Visi dan Misi SKPD .....	16
4.2    Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah SKPD.....	20
4.3    Strategi dan Kebijakan .....	21

BAB V	RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN,INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN,DAN PENDANAAN INDIKATIF .....	28
5.1	Rencana Program dan Kegiatan.....	28
5.2	Indikator kinerja.....	29
5.3	Pendanaan Indikatif.....	31
BAB VI	INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD .....	35
6.1	Urusan Penataan Ruang.....	35
6.2	Urusan Perencanaan Pembangunan.....	35
BAB VII	PENUTUP.....	37



PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG  
KELURAHAN BOJONGBATA

PERATURAN LURAH BOJONGBATA  
KABUPATEN PEMALANG  
NOMOR : 050/12/TAHUN 2011  
TENTANG

RENCANA STRATEGIS KELURAHAN BOJONGBATA  
KABUPATEN PEMALANG TAHUN 2011-2016

KELURAHAN BOJONGBATA KABUPATEN PEMALANG

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan pasal 7 undang-undang Nomor 25 Tahun Tentang sistem Pembangunan Nasional, maka setiap satuan perangkat daerah mempunyai kewajiban menyusun rencana kerja ( Renja);
  - b. bahwa dengan terpilihnya Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah periode 2011-2016 maka Kelurahan Bojongbata sebagai satuan kerja Daerah wajib menyusun Rencana Strategis (Renstra) yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran strategi, kebijakan, program dan kegiatan dengan berpedoman kepada rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) Kabupaten Pemalang;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan peraturan Lurah Bojongbata tentang Rencana Strategis ( Renstra ) Kelurahan Bojongbata Kabupaten Pemalang Tahun 2011-2016

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
  2. Undang-Undang Nomor17 Tahun2003 Tentang Keuangan Negara (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4298);
  3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Negara Nomor 4844);
  5. Undang-Undang Tahun 2004 tentang perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);
  6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 4700);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950;
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4741);
  10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Negara Nomor 4817);
  11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 5 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2011-2016;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 2 Tahun 2007 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Pemalang (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2007 Nomor 2);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Pemalang (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2008 Nomor 1);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 24 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2009 Nomor 24);

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN LURAH BOJONGBATA TENTANG RENCANA STRATEGI (RENSTRA) KELURAHAN BOJONGBATA KABUPATEN PEMALANG TAHUN 2011 – 2016**

**Pasal 1**

Rencana Strategis (Renstra) Kelurahan Bojongbata Tahun 2011-2016 merupakan dokumen perencanaan pada Kelurahan Bojongbata yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan untuk jangka waktu 5 (lima) tahunan dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pemalang Tahun 2011 – 2016

**Pasal 2**

Rencana Strategis (Renstra) Kelurahan Bojongbata Tahun 2011 - 2016 disusun dengan sistematika sbagai berikut :

BAB I : Pendahuluan

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II : Gambaran Pelayanan SKPD

- 2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi SKPD
- 2.2 Sumber Daya SKPD
- 2.3 Kinerja Pelayanan SKPD
- 2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD

BAB III: Isu-isu Strategis Berdasarkan Tugas dan Fungsi

- 3.1 Indentifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan SKPD
- 3.2 Telaahan Visi,Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala daerah terpilih
- 3.3 Penentuan Isu-isu Strategis

BAB IV: Visi, misi, Tujuan dan Sasaran,Strategis dan Kebijakan

- 4.1 Visi dan Misi SKPD
- 4.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah SKPD
- 4.3 Strategi dan Kebijakan

BAB V: Rencana Program dan Kegiatan, Indikator kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif.

- 5.1 Rencana Program dan kegiatan
- 5.2 Indikator Kinerja
- 5.3 Pendanaan Indikatif

BAB VI: Indikator Kinerja SKPD yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

- 6.1 Urusan Penataan Ruang
- 6.2 Urusan Perencanaan Pembangunan

BAB VII Penutup

Pasal 3

Isi, uraian dan perincian Rencana Strategis (Renstra) Sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 sebagaimana tercantum pada lampiran Peraturan ini.

Pasal 4

Peraturan Lurah Bojongbata Kabupaten Pemalang ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Pemalang  
Pada tanggal : 19 September 2011

Lurah Bojongbata



IMAN HIDAYAT, BSc  
Penata Tk I  
NIP.19581222 198903 1 006

**Lampiran : Peraturan Lurah Bojongbata  
Nomor : 050/12/Tahun 2011  
Tanggal : 19 September 2011**

## **BAB I PENDAHULUAN**

### **1.1. LATAR BELAKANG**

Pelaksanaan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005, merupakan bagian dari serangkaian reformasi di bidang pemerintahan. Hal ini membawa konsekuensi yang sangat fundamental tentang arti penting dilakukannya berbagai tindak lanjut dan perubahan serta penyempurnaan mekanisme dan sistem penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan daerah khususnya di Kabupaten Pematang Jaya. Berkaitan dengan hal tersebut, upaya terus menerus telah dilakukan oleh semua elemen pemerintahan dalam rangka mewujudkan demokrasi, desentralisasi, transparansi, akuntabilitas serta penciptaan *good governance* dengan tetap memberikan perhatian penting terhadap upaya pemberdayaan pemerintah daerah dan masyarakat.

Berdasarkan Pasal 15 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional menetapkan bahwa Satuan Kerja Perangkat Daerah menyusun rencana strategis yang selanjutnya disebut RENSTRA – SKPD yang memuat visi, misi, tujuan strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsinya serta berpedoman kepada RPJM Daerah dan bersifat indikatif.

Dengan mempertimbangkan hal tersebut dan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Kelurahan Bojongbata Kabupaten Pematang Jaya, yaitu membantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang pelayanan kepada

masyarakat, melaksanakan program-program pembangunan pembangunan, maka sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kelurahan Bojongbata Kabupaten Pemalang diwajibkan untuk menyusun Rencana Strategis (Renstra) 2011 - 2016 yang mampu memberikan gambaran visi, misi, tujuan, strategi kebijakan, program dan kegiatan yang akan dijalankan beserta indikator penilaian kinerja dalam rangka perwujudan akuntabilitas kinerjanya

Rencana Strategis Kelurahan Bojongbata Kabupaten Pemalang tahun 2011-2016 merupakan kerangka acuan bagi penyusunan Rencana Kerja (Renja) Kelurahan Bojongbata Kabupaten Pemalang yang disusun setiap tahun.

## **1.2. LANDASAN HUKUM**

Penyusunan Renstra Kelurahan Bojongbata Kabupaten Pemalang Tahun 2011-2016, berlandaskan pada :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005;
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Pusat dan Kewenangan Pemerintah Propinsi sebagai Daerah Otonom;
7. Pemerintah Pusat dan Kewenangan Pemerintah Provinsi sebagai Daerah Otonom;

8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2004-2009;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Pematang Jaya Nomor 2 tahun 2006 Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah
14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
15. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025;
16. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008-2013;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Pematang Jaya Nomor 24 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten Pematang Jaya Tahun 2005-2025.
18. Perda Nomor 5 Tahun 2011 tentang RPJMD

### **1.3. MAKSUD DAN TUJUAN**

Maksud dan tujuan penyusunan Rencana Strategis ini disusun dengan maksud untuk memberikan arah dan pedoman dalam rangka menjabarkan program kerja dan kegiatan pada unit kerja

Kelurahan Bojongbata Kabupaten Pematang serta sebagai tolok ukur tingkat keberhasilan ( efisiensi kinerja,juga evaluasi eektivitas/manfaat) yang dicapai selama dalam pelaksanaantugas-tugas kedinasan.

Renstra adalah memberikan arahan sekaligus menjadi acuan bagi seluruh pe laku pembangunan antara lain ;

- a. Menyediakan acuan resmi bagi Kelurahan Bojongbata Kabupaten Pematang dalam menentukan prioritas program dan kegiatan tahunan yang akan dibiayai dari APBD Kabupaten Pematang.
- b. Menyediakan satu tolok ukur untuk mengukur dan melakukan evaluasi kinerja tahunan Kelurahan Bojongbata Kabupaten Pematang
- c. Memudahkan seluruh jajaran aparatur Kelurahan Bojongbata Kabupaten Pematang dalam mencapai tujuan dengan cara Menyusun program dan kegiatan secara terpadu,trearah dan terukur.
- d. Memudahkan seluruh jajaran aparatur Kelurahan Bojongbata Kabupaten Pematang untuk memahami dan menilai arah Kebijakan dan program serta kegiatan operasional tahunan dalam rentang waktu lima tahun.

Rencana Sestrategis ini disusun dengan magsud untuk memberikan arah dan pedoman dalam rangka menjabarkan program kerja dan kegiatan pada unit kerja Kelurahan Bojongbata Kabupaten Pematang serta sebagai tolok ukur tingkat keberhasilan ( efisiensi kinerja,juga evaluasi eektivitas/manfaat) yang dicapai selama dalam pelaksanaantugas-tugas kedinasan.

#### **1.4. SISTEMATIKA PENULISAN :**

Sistematika penulisan Rencana Strategis (Renstra) Kelurahan Bojongbata Kabupaten Pematang Tahun 2011 – 2016 adalah sebagai berikut :

##### **BAB I PENDAHULUAN**

- I.1 . Latar Belakang
- I.2 Landasan Hukum
- I.3 Maksud dan Tujuan
- I.4 Sistematika Penulisan

##### **BAB.II. GAMBARAN PELAYANAN SKPD**

- 2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi SKPD
- 2.2 Sumber Daya SKPD
- 2.3 Kinerja Pelayanan SKPD
- 2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD

##### **BAB .III. ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI**

- 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas Dan Fungsi Pelayanan SKPD
- 3.2 Telaahan Fisi Misi dan Program Kepala Daerah Dan Wakil Kepala daerah Terpilih
- 3.3 Penentuan Isu-isu Setrategis

##### **BAB. IV. VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN**

- 4.1 Visi dan Misi SKPD
- 4.2 Tujuan dan sasaran Jangka Menengah SKPD
- 4.3 Strategi dan kebijakan

##### **BAB.V. RENCANA RPROGRAM DAN KEGIATAN,INDIKATOR KINERJA,KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF**

- 5.1 Program
- 5.2 Kegiatan

##### **BAB.VI INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD**

- 6.1 Urusan Penataan Ruang
- 6.2 Urusan Peranan Pembangunan
- 6.3 Urusan Statistik

##### **BAB.VII PENUTUP**

## **BAB II**

### **GAMBARAN PELAYANAN SKPD**

#### **2.1 TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI SKPD**

Sesuai Peraturan Bupati Pematang Nomor 97 Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Kelurahan Kabupaten Pematang, Kelurahan Bojongbata mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.

Tugas-tugas tersebut mempunyai nilai yang strategis, sebab selain menyangkut upaya untuk menyelenggarakan pemerintahan yang optimal juga berpengaruh pada peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan masyarakat

Dalam menyelenggarakan tugas pokok tersebut Kelurahan Bojongbata mempunyai fungsi :

- a. pelayanan teknis administrasi kepada seluruh satuan organisasi ,aparatur dan masyarakat ;
- b. pengkoordinasian penyusunan perencanaan pembangunan daerah di tingkat kelurahan ;
- c. pelaksanaan penyusunan rencana dan program, monitoring evaluasi dan pelaporan di bidang pembangunan daerah di tingkat kelurahan ;
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Kelurahan Bojongbata Kabupaten Pematang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Pematang Nomor 15 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kelurahan Kabupaten Pematang, dengan Susunan Organisasi Kelurahan Bojongbata terdiri dari :

1. Lurah;
2. Sekretariat Kelurahan;
3. Seksi Pemerintahan;
4. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum ;

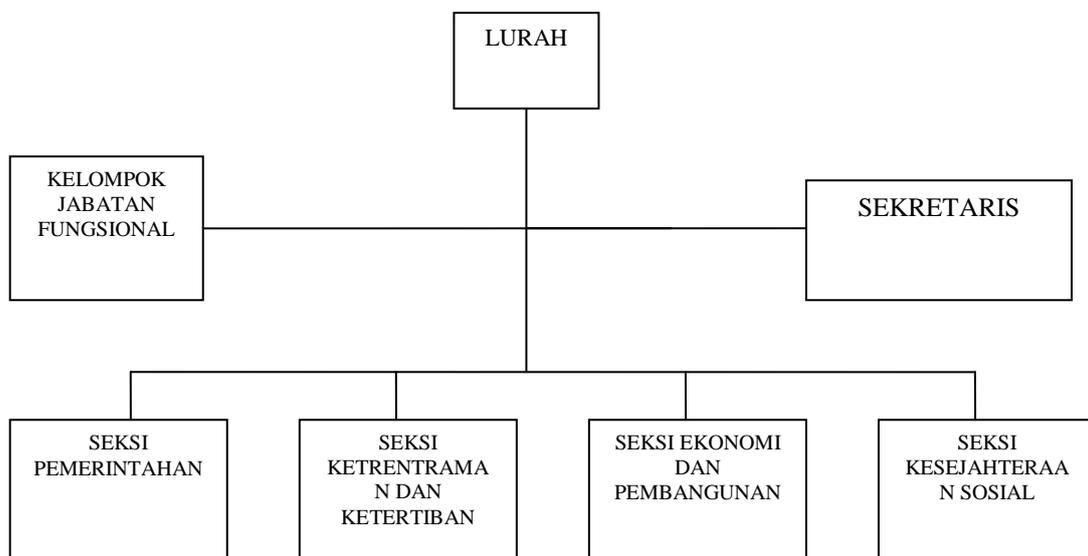
5. Seksi Ekonomi dan Pembangunan;
6. Seksi Kesejahteraan Sosial.
7. Kelompok Jabatan Fungsional;

Tugas-tugas tersebut mempunyai nilai yang strategis, sebab selain menyangkut upaya untuk menyelenggarakan pemerintahan yang optimal juga berpengaruh pada peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan masyarakat

Eseloning jabatan pada Kelurahan Bojongbata Kabupaten Pematang Jaya adalah sebagai berikut :

- a. Lurah = eselon IV.a
- b. Sekretaris Kelurahan = eselon IV.b
- c. Kepala Seksi = eselon IV.b

Adapun struktur organisasi dan tata kerja Kelurahan Bojongbata Kabupaten Pematang Jaya adalah sebagai berikut



## 2.2. SUMBER DAYA SKPD

Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Kelurahan Bojongbata didukung oleh personil sebanyak 32 orang dengan rincian sebagai berikut :

### a. Perincian Berdasarkan Jumlah Personil

NO	JABATAN	JUMLAH
1.	Lurah	1 orang
2.	Sekretaris Kelurahan	1 orang
3.	Kepala Seksi	4 orang
4.	Staf PNS	8 orang
5.	Staf Non PNS	9 orang
6.	Wiyata Bakti	9 orang
Jumlah		32 orang

### b. Perincian Berdasarkan Pendidikan

NO	JABATAN	PENDIDIKAN						JUMLAH
		S D	SLTP	SLTA	SARMUD	S 1	S 2	
1.	Lurah	-	-	-	1	-	-	1
2.	Sekretaris Kelurahan	-	-	1	-	-	-	1
3.	Kepala Seksi	-	-	3	-	1	-	4
4.	Staf PNS	1	1	6	-	-	-	8
5.	Staf Non PNS	1	1	6	1	-	-	9
6.	Staf Wiyata Bakti	-	-	7	1	1	-	9
Jumlah		2	2	23	3	2	-	32

c. Perincian Berdasarkan Golongan Ruang

NO	JABATAN	GOL. RUANG				JUMLAH
		I	II	III	IV	
1.	Lurah	-	-	1	-	1
2.	Sekretaris Kelurahan	-	-	1	-	1
3.	Kepala Seksi	-	-	4	-	4
4.	Staf PNS	1	6	1	-	8
5.	Staf Non PNS	-	-	-	-	9
6.	Wiyata Bakti	-	-	-	-	9
Jumlah		1	6	7	-	32

d. Perincian Berdasarkan Diklat

NO	JABATAN	JUMLAH			JUMLAH
		II	III	IV	
1.	Lurah	-	-	1	1
2.	Sekretaris Kelurahan	-	-	1	1
3.	Kepala Seksi	-	-	4	4
	<i>Belum Mengikuti Diklatpim</i>				
4.	Staf	-	-	-	26
Jumlah		-	-	6	32

e. Perincian Berdasarkan Umur

NO	KOMPOSISI MENURUT UMUR	JUMLAH
1.	Umur 20 – 30 Tahun	1
2.	Umur 31 – 40 Tahun	11
3.	Umur 41 – 50 Tahun	14
4.	Umur 51 Tahun ke atas	6
Jumlah		32

### 2.3. KINERJA PELAYANAN SKPD

Untuk memperlancar pelaksanaan tugas, Kelurahan Bojongbata Kabupaten Pemalang memiliki Sarana dan Prasarana yang merupakan faktor penting dalam penyelenggaraan administrasi pemerintah dan pelayanan masyarakat. Sarana dan Prasarana yang ada pada Kelurahan Bojongbata Kabupaten Pemalang dapat dirinci sebagai berikut :

No.	NAMA BARANG	JUMLAH
1.	Sepeda Motor	2 unit
2.	Mesin Tik	3 unit
3.	Laptop	1 buah
4.	Komputer	2 unit
5.	Laptop	1 unit
6.	Printer	3 unit
7.	Tape Recorder/Wireles	1 buah
8.	Mebeleur	24 unit
9.	Filing Cabinet	7 buah
10.	TV	1 unit
11.	Camera Digital	1 unit
12.	Kursi rapat	50 unit

### 2.4. TANTANGAN DAN PELUANG PENGEMBANGAN PELAYANAN SKPD

- a. Kondisi Sarana dan Prasarana Kantor Kelurahan Bojongbata yang belum memadai untuk pelaksanaan pelayanan prima kepada masyarakat .
- b. Belum meratanya program dan pelaksanaan pembangunan di wilayah kelurahan Bojongbata.
- c. Tingkat pendidikan masyarakat kelurahan Bojongbata rata-rata belum memadai.
- d. Tingkat kesehatan dan kesejahteraan masyarakat masih kurang.
- e. Kompleks dan rumitnya permasalahan di tingkat Kelurahan

## **BAB III**

### **ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI**

#### **3.1 IDENTIFIKASI PERMASALAHAN BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI PELAYANAN SKPD**

Isu-isu strategis yang sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2011-2016 untuk SKPD Kelurahan Bojongbata mencakup:

- a. Kondisi Sarana dan Prasarana Kantor Kelurahan Bojongbata yang belum memadai untuk pelaksanaan pelayanan prima kepada masyarakat .
- b. Belum meratanya program dan pelaksanaan pembangunan di wilayah kelurahan Bojongbata.
- c. Tingkat pendidikan masyarakat kelurahan Bojongbata rata-rata belum memadai.
- d. Tingkat kesehatan dan kesejahteraan masyarakat masih kurang.
- e. Kompleks dan rumitnya permasalahan di tingkat Kelurahan.

Adapun kondisi umum Kelurahan Bojongbata Kabupaten Pemalang saat ini yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi adalah sebagai berikut:

Kelurahan Bojongbata Kabupaten Pemalang dalam pelaksanaan tugas pokok membantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan telah melaksanakan kegiatan tahun - tahun sebelumnya dengan menghasilkan sasaran :

- a. penyelenggaraan kegiatan pelayanan kepada masyarakat.
- b. penarikan Pajak Bumi dan Bangunan.
- c. pelaksanaan pembangunan sarana dan prasarana di tingkat kelurahan dengan dana yang bersumber dari pemerintah dan swadaya masyarakat bersama stake holder di tingkat kelurahan.

d. peningkatan tingkat pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan masyarakat

e. penanganan dan pemecahan masalah ditingkat masyarakat

Dari 5 (lima) sasaran tersebut telah dijabarkan dalam kebijakan, program dan kegiatan. Adapun capaian kinerja yang dihasilkan 1 tahun terakhir adalah sebagai berikut :

No.	Sasaran	Nilai Capaian
1.	penyelenggaraan pelayanan kepada masyarakat	100%
2.	penarikan Pajak Bumi Bangunan	76,23 %
3.	pelaksanaan pembangunan sarana dan prasarana di tingkat kelurahan dengan dana yang bersumber dari pemerintah dan swadaya masyarakat bersama stake holder di tingkat kelurahan.	100%
4.	peningkatan tingkat pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan masyarakat	100%
5.	penanganan dan pemecahan masalah ditingkat masyarakat	98,57 %

Apabila dilihat dari capaian kinerja tahun terakhir tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa secara keseluruhan program dan kegiatan yang telah ditetapkan selama Tahun 2006 – 2010 dapat dilaksanakan dengan baik meskipun tidak terlepas dari permasalahan-permasalahan yang terkadang dijumpai.

Berdasarkan permasalahan, tantangan dan keterbatasan yang dihadapi oleh kelurahan Bojongbata Kabupaten Pemalang, maka untuk jangka waktu 5 (lima) tahun kedepan yaitu Tahun 2011-2016, Kelurahan Bojongbata Kabupaten Pemalang harus dapat mengatasi permasalahan yang dihadapi.

Dengan melihat kondisi tersebut, maka untuk mewujudkan peningkatan bidang penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan Kabupaten Pemalang diperlukan suatu kondisi yang baik yang dapat menjamin terlaksananya kegiatan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan

Untuk mewujudkan kondisi tersebut, sesuai tugas pokok dan fungsi kelurahan Bojongbata Kabupaten Pematang Jaya, maka untuk Tahun 2011-2016 Kelurahan Bojongbata Kabupaten Pematang Jaya menginginkan adanya peningkatan kualitas bidang penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan kemasyarakatan Untuk itu sasaran yang ingin dicapai selama Tahun 2006 – 2011 adalah :

1. Terselenggaranya pelayanan kepada masyarakat.
2. Tercapainya target penarikan Pajak Bumi dan Bangunan.
3. Terselenggaranya pembangunan sarana dan prasarana di wilayah kelurahan Bojongbata secara merata dan baik
4. Tercapainya peningkatan tingkat pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan masyarakat.
5. Tercapainya penyelesaian masalah yang dihadapi masyarakat

Adapun hasil kinerja yang diinginkan selama 5 tahun (Tahun 2011–2016) dapat diwujudkan dalam program-program adalah sebagai berikut :

1. Program Pelayanan Jasa Administrasi Perkantoran
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur
4. Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
5. Program Perencanaan Pembangunan Daerah

### **3.2 TELAAHAN FISI MISI DAN PROGRAM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH TERPILIH**

Untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas pelaksanaan program, Kelurahan Bojongbata Kabupaten Pematang Jaya harus terus menerus melakukan perubahan ke arah perbaikan. Perubahan tersebut harus disusun dalam suatu tahapan yang konsisten dan berkelanjutan, sehingga dapat meningkatkan akuntabilitas dan kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil.

Tahap sebagaimana tersebut di atas, dimulai dengan perumusan visi yang jelas. Visi adalah cara pandang jauh ke depan ke mana instansi pemerintah harus di bawa agar dapat eksis, antisipatif dan

inovatif. Visi adalah suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan yang diinginkan oleh instansi pemerintah. Visi tersebut harus mampu :

- Menarik komitmen dan menggerakkan orang
- Menciptakan makna bagi kehidupan bermasyarakat
- Menciptakan standar kompetensi
- Menjembatani keadaan sekarang dan keadaan masa depan

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Visi Kelurahan Bojongsata Kabupaten Pemalang adalah :

"Kelurahan Bojongsata Yang prima dalam pelayanan masyarakat "

Visi Kelurahan Bojongsata Kabupaten Pemalang sebagaimana tersebut di atas mempunyai makna, bahwa perencanaan pembangunan di masa datang merupakan perencanaan partisipatif, dengan melibatkan semua pihak yang berkepentingan (stakeholders) berdasarkan mekanisme perencanaan dari bawah (aspiratif, demokratis, terpadu). Disamping itu, perencanaan harus sesuai (terarah) dengan dokumen-dokumen perencanaan yang sudah ada, misalnya RPJM Daerah Kabupaten Pemalang dan RPJP Daerah Kabupaten Pemalang.

Untuk mewujudkan visi Kelurahan Bojongsata Kabupaten Pemalang sebagaimana dimaksud diatas, haruslah ditetapkan suatu misi, yaitu sasaran yang ingin dicapai dalam kurun waktu tertentu melalui penerapan strategi yang dipilih. Misi merupakan pernyataan yang menetapkan tujuan suatu instansi pemerintah. Misi adalah tujuan utama kearah mana perencanaan dan program suatu instansi pemerintah yang ingin dicapai.

Misi Kelurahan Bojongsata Kabupaten Pemalang adalah :

- a. Bersinergi dengan jajaran kesehatan dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat;
- b. Fasilitasi kesempatan belajar lewat program formal dan pendidikan luar sekolah bersinergi dengan jajaran pendidikan;

- c. Melaksanakan pelayanan prima kepada masyarakat
- d. Meningkatkan profesionalisme dan kemampuan aparat kelurahan ;
- e. Melaksanakan pembangunan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan bersinergi dengan stake holder ;
- f. Fasilitasi dan kesempatan berusaha bagi masyarakat ;
- g. Peningkatkan kehidupan dan kerukunan umat beragama ;

### **3.3 PENENTUAN ISU-ISU SETRATEGIS**

Pengidentifikasian faktor-faktor penentu keberhasilan merupakan faktor penting dalam perencanaan strategis. Hal ini harus dilalui agar Kelurahan Bojongbata Kabupaten Pemalang mampu menjawab tuntutan atas isu-isu strategis yang dihadapi.

Faktor-faktor penentu keberhasilan juga berfungsi untuk lebih memfokuskan strategi organisasi dalam rangka pencapaian tujuan organisasi secara efektif dan efisien. Faktor-faktor penentu keberhasilan pada Kelurahan Bojongbata Kabupaten Pemalang dapat diidentifikasi sebagai berikut :

- a. Memanfaatkan dukungan dari pimpinan untuk membuat perencanaan dan pelaksanaan kegiatan yang akuntabel.
- b. Optimalkan koordinasi dan konsultasi dengan institusi dan stakeholders terkait untuk membuat perencanaan dan pelaksanaan kegiatan yang akuntabel
- c. Memanfaatkan adanya sarana dan prasarana untuk mendukung kesadaran masyarakat yang tinggi dalam membuat perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pembangunan
- d. Meningkatkan keterlibatan para pelaku (stakeholders) untuk mendukung kesadaran masyarakat yang tinggi dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan.

Memanfaatkan dan memotivasi partisipasi masyarakat untuk pemecahan masalah di tingkat basis.

**BAB IV**  
**VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN,**  
**STRATEGI DAN KEBIJAKAN**

**4.1 VISI DAN MISI SKPD**

Visi adalah kondisi ideal yang akan dicapai oleh suatu organisasi sedangkan misi adalah langkah – langkah yang diambil untuk mewujudkan visi tersebut. Guna melaksanakan tugas pokok dan fungsinya Kelurahan Bojongbata memiliki visi dan misi sebagai berikut :

1. **Visi** Kelurahan Bojongbata

**“Kelurahan Bojongbata Yang prima dalam pelayanan masyarakat ”**

Dalam visi tersebut mengandung pengertian bahwa Kelurahan Bojongbata menjadi pusat pelayanan administrasi, koordinasi dan konsultasi yang partisipatif dari masyarakat.

2. **Misi** Kelurahan Bojongbata

Misi yang dirumuskan dalam upaya mencapai visi adalah sebagai berikut :

- a. Mewujudkan tertib administrasi ketatausahaan, keuangan dan pengelolaan rumah tangga.
- b. Mewujudkan kualitas penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik.
- c. Mewujudkan sistem perencanaan pembangunan yang berwawasan pada kekuatan partisipatif publik.

Untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas pelaksanaan program, Kelurahan Bojongbata Kabupaten Pemalang harus terus menerus melakukan perubahan ke arah perbaikan. Perubahan tersebut harus disusun dalam suatu tahapan yang konsisten dan berkelanjutan, sehingga dapat meningkatkan akuntabilitas dan kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil.

Tahap sebagaimana tersebut di atas, dimulai dengan perumusan visi yang jelas. Visi adalah cara pandang jauh ke depan ke mana instansi pemerintah harus di bawa agar dapat eksis, antisipatif dan inovatif. Visi adalah suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan yang diinginkan oleh instansi pemerintah. Visi tersebut harus mampu :

- Menarik komitmen dan menggerakkan orang
- Menciptakan makna bagi kehidupan bermasyarakat
- Menciptakan standar kompetensi
- Menjembatani keadaan sekarang dan keadaan masa depan

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Visi Kelurahan Bojongsata Kabupaten Pemalang adalah :

”Terwujudnya Pelayanan Masyarakat yang Prima ”

### **Penjelasan Makna Visi**

Visi Kelurahan Bojongsata Kabupaten Pemalang sebagaimana tersebut di atas mempunyai makna, bahwa perencanaan pembangunan di masa datang merupakan perencanaan partisipatif, dengan melibatkan semua pihak yang berkepentingan (stakeholders) berdasarkan mekanisme perencanaan dari bawah (aspiratif, demokratis, terpadu). Disamping itu, perencanaan harus sesuai (terarah) dengan dokumen-dokumen perencanaan yang sudah ada, misalnya RPJM Daerah Kabupaten Pemalang dan RPJP Daerah Kabupaten Pemalang.

Untuk mewujudkan visi Kelurahan Bojongsata Kabupaten Pemalang sebagaimana dimaksud diatas, haruslah ditetapkan suatu misi, yaitu sasaran yang ingin dicapai dalam kurun waktu tertentu melalui penerapan strategi yang dipilih. Misi merupakan pernyataan yang menetapkan tujuan suatu instansi pemerintah. Misi adalah tujuan utama kearah mana perencanaan dan program suatu instansi pemerintah yang ingin dicapai.

Misi Kelurahan Bojongsata Kabupaten Pemalang adalah :

- h. Bersinergi dengan jajaran kesehatan dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat;

- i. Fasilitasi kesempatan belajar lewat program formal dan pendidikan luar sekolah bersinergi dengan jajaran pendidikan;
- j. Melaksanakan pelayanan prima kepada masyarakat
- k. Meningkatkan profesionalisme dan kemampuan aparat kelurahan ;
- l. Melaksanakan pembangunan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan bersinergi dengan stake holder ;
- m. Fasilitasi dan kesempatan berusaha bagi masyarakat ;
- n. Peningkatkan kehidupan dan kerukunan umat beragama ;

### **Penjelasan Makna Misi**

- Makna dari misi **pertama** adalah bahwa untuk menuju peningkatan kesehatan masyarakat diperlukan upaya-upaya nyata yang melibatkan partisipasi masyarakat dan dukungan dari instansi terkait
- Makna dari misi **kedua** mengandung maksud bahwa untuk meningkatkan tingkat kecerdasan masyarakat diperlukan dukungan dari semua pihak-pihak yang terkait termasuk partisipasi masyarakat
- Makna dari misi **ketiga** adalah bahwa untuk melaksanakan pelayanan prima kepada masyarakat sangat dibutuhkan sarana dan prasarana yang memadai
- Makna dari misi **keempat** adalah dalam rangka melaksanakan pelayanan prima kepada masyarakat baik yang menyangkut kebutuhan pelayanan administrasi maupun pemecahan atas masalah yang dihadapi masyarakat di tingkat basis dibutuhkan kemampuan yang handal dan memadai dari aparat kelurahan.
- Makna dari misi **kelima** adalah bahwa untuk membangun baik yang menyangkut perencanaan dan pelaksanaan pembangunan diperlukan keterpaduan pembangunan antar unsur terkait dengan mempertimbangkan keterkaitan antar

stakeholder, antar bidang, dan antar kawasan maupun antar wilayah/daerah

- Makna dari misi **keenam** adalah bahwa dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat diberikan kemudahan dan fasilitasi kepada masyarakat dalam kesempatan berusaha menambah penghasilan sesuai dengan ketrampilan yang dimiliki.
- Makna dari misi **ketujuh** untuk keserasian dan keharmonisan hubungan antar umat beragama diberikan kebebasan memeluk dan menjalankan ibadah sesuai dengan akidah yang diyakini dengan tetap berpedoman pada aturan dan ketentuan perundangan yang berlaku.

Pengidentifikasian faktor-faktor penentu keberhasilan merupakan faktor penting dalam perencanaan strategis. Hal ini harus dilalui agar Kelurahan Bojongbata Kabupaten Pemalang mampu menjawab tuntutan atas isu-isu strategis yang dihadapi.

Faktor-faktor penentu keberhasilan juga berfungsi untuk lebih memfokuskan strategi organisasi dalam rangka pencapaian tujuan organisasi secara efektif dan efisien. Faktor-faktor penentu keberhasilan pada Kelurahan Bojongbata Kabupaten Pemalang dapat diidentifikasi sebagai berikut :

- e. Memanfaatkan dukungan dari pimpinan untuk membuat perencanaan dan pelaksanaan kegiatan yang akuntabel.
- f. Optimalkan koordinasi dan konsultasi dengan institusi dan stakeholders terkait untuk membuat perencanaan dan pelaksanaan kegiatan yang akuntabel
- g. Memanfaatkan adanya sarana dan prasarana untuk mendukung kesadaran masyarakat yang tinggi dalam membuat perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pembangunan
- h. Meningkatkan keterlibatan para pelaku (stakeholders) untuk mendukung kesadaran masyarakat yang tinggi dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan.

- i. Memanfaatkan dan memotivasi partisipasi masyarakat untuk pemecahan masalah di tingkat basis.

#### **4.2 TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH SKPD**

Dari visi dan misi yang telah ditetapkan, selanjutnya dapat diuraikan lebih dalam tujuan dan sasaran sebagai kondisi antara sebelum tercapainya visi dan misi.

Tujuan dan sasaran merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi. Tujuan tidak harus dinyatakan dalam bentuk kuantitatif, akan tetapi harus menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai di masa mendatang, yaitu :

- terwujudnya peningkatan kesehatan masyarakat secara nyata yang melibatkan partisipasi masyarakat dan dukungan dari instansi terkait
- tercapainya peningkatan tingkat kecerdasan masyarakat sebagaimana dengan dukungan dari semua pihak-pihak yang terkait termasuk partisipasi masyarakat
- terwujudnya pelayanan prima kepada masyarakat dengan sarana dan prasarana yang memadai
- terwujudnya kemampuan aparat kelurahan yang handal dan memadai dalam rangka melaksanakan pelayanan prima kepada masyarakat dan pemecahan masalah yang ditemui masyarakat ditingkat bawah
- tersedianya data perencanaan dan pelaksanaan pembangunan yang disusun dan dilaksanakan dengan keterpaduan antar stakeholders dan unsur-unsur terkait lainnya
- terselenggaranya fasilitasi dan kemudahan masyarakat dalam berusaha untuk meningkatkan taraf dan tingkat kesejahteraan hidupnya
- terwujudnya keserasian dan keharmonisan hubungan antar umat beragama diberikan kebebasan memeluk dan menjalankan ibadah sesuai dengan akidah yang diyakini

dengan tetap berpedoman pada aturan dan ketentuan perundangan yang berlaku

Adapun Sasaran sebagai penjabaran dari tujuan merupakan sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan oleh suatu instansi pemerintah dalam jangka waktu tertentu. Untuk tujuan tersebut diatas, maka sasaran organisasi Kelurahan Bojongbata Kabupaten Pematang pada Tahun 2011-2016 :

1. Terwujudnya tingkat kesehatan masyarakat
2. Tercapainya peningkatan kecerdasan masyarakat
3. Terselenggaranya pelayanan prima kepada masyarakat
4. Tercapainya kehandalan kemampuan aparat
5. Tersedianya data bahan rancangan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan yang berkualitas
6. Terwujudnya fasilitasi dan kemudahan masyarakat dalam berusaha
7. Terwujudnya keserasian dan keharmonisan hubungan antar umat beragama

#### **4.3 STRATEGI DAN KEBIJAKAN**

Faktor faktor kunci keberhasilan adalah unsur-unsur dari suatu organisasi yang menentukan keberhasilan atau kegagalan strategi organisasi. Faktor faktor kunci keberhasilan merupakan hasil pengembangan informasi yang diperoleh dari unsur-unsur perencanaan strategis. Analisis lingkungan internal dan eksternal yang dilakukan menjadi landasan kritis dalam merancang strategi. Secara konstruksi teroris dilakukan dengan Metode SWOT (*Strength, Weakness, Opportunities, and Threat*) yang pada dasarnya dapat dikelompokkan dalam 4 kelompok strategi.

Berikut ini adalah analisis SWOT untuk kelurahan Bojongbata Kab. Pematang:

##### **ANALISASI SWOT**

##### **a. Strength (Kekuatan)**

Faktor internal suatu organisasi yang dapat mendorong tercapainya peningkatan kinerja sehingga dapat tercapai tujuan yang diinginkan,

merupakan kekuatan yang dimiliki oleh organisasi tersebut. Untuk kelurahan Bojongsata Kab. Pemalang kekuatan yang dimiliki adalah:

1. adanya dukungan pemimpin
2. adanya sarana dan prasarana
3. adanya program yang jelas
4. tingginya motivasi aparat.

#### ***b. Weakness/Kelemahan***

Dari faktor internal suatu organisasi, disadari adanya kelemahan yang berpengaruh terhadap keberhasilan pencapaian kinerja. Pada Kelurahan Bojongsata Kab. Pemalang, dapat diidentifikasi adanya beberapa kelemahan sebagai berikut:

1. kurangnya koordinasi dengan dinas/instansi terkait.
2. kurangnya keterlibatan para pelaku (stakeholders).
3. kurangnya kemampuan dan ketrampilan aparat
4. rendahnya disiplin aparat
5. kompleksnya permasalahan di masyarakat.

#### ***c. Opportunities (Peluang)***

Faktor eksternal organisasi mempunyai berbagai peluang untuk mencapai tujuan organisasi seperti yang diharapkan. Pada kelurahan Bojongsata Kab. Pemalang dapat diidentifikasi adanya peluang sebagai berikut:

1. tersedianya data perencanaan yang valid.
2. adanya partisipasi dan kesadaran masyarakat.
3. tersedianya peraturan dan pedoman yang jelas

#### ***d. Treats (Ancaman)***

Dari faktor eksternal organisasi, selain faktor peluang didapat pula adanya ancaman. Pada kelurahan Bojongsata Kab. Pemalang ancaman tersebut dapat diidentifikasi antara lain:

1. sering terjadinya perubahan kebijakan pemerintah
2. kurangnya data yang valid untuk perencanaan
3. kurangnya kepercayaan masyarakat pada aparat

Dari keseluruhan faktor-faktor internal maupun eksternal tersebut, dapat dituangkan ke dalam tabel sebagai berikut:

### FAKTOR-FAKTOR INTERNAL

<b>KEKUATAN</b>	<b>KELEMAHAN</b>
1.adanya dukungan pemimpin 2.adanya sarana dan prasarana 3.adanya program yang jelas 4.tingginya motivasi aparat. .	1.kurangnya koordinasi dengan dinas /instansi terkait. 2.kurangnya keterlibatan para pelaku (stakeholders). 3.kurangnya kemampuan dan ketrampilan aparat 4.rendahnya disiplin aparat 5.kompleknya permasalahan di masyarakat.

### FAKTOR-FAKTOR EKSTERNAL

<b>PELUANG</b>	<b>ANCAMAN</b>
1. tersedianya data perencanaan yang valid. 2. adanya partisipasi dan kesadaran masyarakat. 3. tersedianya peraturan dan pedoman yang jelas	1.sering terjadinya perubahan kebijakan Pemerintah 2.kurangnya data yang valid untuk perencanaan 3.kurangnya kepercayaan masyarakat pada aparat

### ANALISIS FAKTOR-FAKTOR STRATEGI

<b>FAKTOR LINGKUNGAN</b>	<b>BOBOT</b>	<b>RATING</b>	<b>SCORE</b>	<b>PRIORITAS</b>
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Kekuatan (Strength)				
1.adanya dukungan pemimpin	<b>40</b>	<b>4</b>	<b>160</b>	<b>I</b>
2.adanya sarana dan prasarana yang	<b>30</b>	<b>3</b>	<b>90</b>	<b>II</b>

memadai	<b>20</b>	<b>2</b>	<b>40</b>	<b>III</b>
3.adanya program yang jelas	<b>10</b>	<b>1</b>	<b>10</b>	<b>IV</b>
4.tingginya motivasi aparat.				
	<b>100</b>			
<b>Kelemahan (Weaknesses)</b>				
1.kurangnya koordinasi dengan dinas/instansi terkait.	<b>40</b>	<b>4</b>	<b>160</b>	<b>I</b>
2.kurangnya keterlibatan para pelaku (stakeholders) dalam perencanaan.	<b>30</b>	<b>3</b>	<b>90</b>	<b>II</b>
3.kurangnya kemampuan dan ketrampilan aparat	<b>20</b>	<b>2</b>	<b>40</b>	<b>III</b>
4.rendahnya disiplin aparat	<b>10</b>	<b>1</b>	<b>10</b>	<b>IV</b>
	<b>100</b>			
<b>Peluang (Opportunities)</b>				
1.adanya dokumen perencanaan untuk membuat perencanaan yang akuntabel	<b>40</b>	<b>4</b>	<b>160</b>	<b>I</b>
2.adanya kesadaran masyarakat yang tinggi untuk terlibat dalam perencanaan	<b>25</b>	<b>3</b>	<b>75</b>	<b>II</b>
3.adanya kewenangan yang luas di bidang perencanaan	<b>20</b>	<b>2</b>	<b>40</b>	<b>III</b>
4.tersedianya peraturan dan pedoman yang jelas	<b>15</b>	<b>1</b>	<b>15</b>	<b>IV</b>
	<b>100</b>			
<b>Tantangan (Threats)</b>				
1.sering terjadinya perubahan kebijakan pemerintah	<b>40</b>	<b>4</b>	<b>280</b>	<b>I</b>
2.kurangnya data yang valid untuk perencanaan	<b>30</b>	<b>3</b>	<b>90</b>	<b>II</b>
3.kurangnya kepercayaan masyarakat pada aparat	<b>20</b>	<b>2</b>	<b>40</b>	<b>III</b>
4.adanya keresahan aparatur karena kurangnya sosialisasi penetapan SOT baru.	<b>10</b>	<b>1</b>	<b>10</b>	<b>IV</b>
	<b>100</b>			

**ANALISIS SWOT UNTUK Mencari Strategi**

<p><b>Internal (ALI)</b></p> <p style="text-align: right;"><b>Eksternal (ALE)</b></p>	<p><b>Kekuatan (Strength)</b></p> <p>1. adanya dukungan pemimpin</p> <p>2. adanya sarana dan prasarana yang memadai</p>	<p><b>Kelemahan (Weaknesses)</b></p> <p>1. kurangnya koordinasi dengan dinas/instansi terkait.</p> <p>2. kurangnya keterlibatan para pelaku (stakeholders) dalam perencanaan.</p>
---	---	---

<p><b>Peluang (Opportunities)</b></p> <p>1. adanya dokumen perencanaan untuk membuat perencanaan yang akuntabel</p> <p>2. adanya kesadaran masyarakat yang tinggi untuk terlibat dalam perencanaan</p>	<p><b>Strategi SO</b></p> <p>1. Manfaatkan dukungan dari pemimpin untuk membuat perencanaan yang akuntabel</p> <p>2. Manfaatkan adanya sarana dan prasarana untuk mendukung kesadaran masyarakat yang tinggi untuk terlibat dalam perencanaan pembangunan.</p>	<p><b>Strategi WO</b></p> <p>1. Optimalkan koordinasi dengan dinas/instansi terkait untuk membuat perencanaan yang akuntabel</p> <p>2. Tingkatkan keterlibatan para pelaku (stakeholders) untuk mendukung kesadaran masyarakat yang tinggi dalam perencanaan pembangunan.</p>
<p><b>Tantangan (Threats)</b></p> <p>1. sering terjadinya perubahan kebijakan pemerintah</p> <p>2. kurangnya data yang valid untuk perencanaan</p>	<p><b>Strategi ST</b></p> <p>1. Manfaatkan dukungan dari pemimpin untuk mengatasi sering terjadinya perubahan kebijakan pemerintah</p> <p>2. Manfaatkan adanya sarana dan prasarana untuk mengatasi kurangnya data yang valid untuk perencanaan</p>	<p><b>Strategi WT</b></p> <p>1. Optimalkan koordinasi dengan dinas/instansi terkait untuk mengatasi sering terjadinya perubahan kebijakan pemerintah.</p> <p>2. Tingkatkan keterlibatan masyarakat untuk mengatsai kurangnya data yang valid untuk perencanaan</p>

FAKTOR PENENTU KEBERHASILAN FPK

NO.	STRATEGI	KETERIKATAN DENGAN								URUTAN FPK		
		VISI	MISI				NILAI					
			1	2	3	4	1	2	3	4		
1.	SO Manfaatkan dukungan dari pemimpin untuk membuat perencanaan yang akuntabel	4	4	3	3	4	4	4	4	4	34	I
	2.	Manfaatkan adanya sarana dan prasarana untuk mendukung kesadaran masyarakat yang tinggi Untuk terlibat dalam perencanaan pembangunan.	4	4	4	3	4	4	3	3	3	32
1.	ST Manfaatkan dukungan dari pemimpin untuk mengatasi sering terjadinya perubahan kebijakan pemerintah	4	3	4	3	3	4	2	3	3	29	V
	2.	Manfaatkan adanya sarana dan prasarana untuk mengatasi kurangnya data yang valid untuk perencanaan	4	2	3	2	4	2	3	3	3	26
1.	WO Optimalkan koordinasi dengan dinas/instansi terkait untuk membuat perencanaan yang akuntabel	4	4	3	3	4	4	3	4	4	33	II
	2.	Tingkatkan keterlibatan para pelaku (stakeholders) untuk mendukung kesadaran masyarakat yang tinggi dalam perencanaan pembangunan.	4	4	3	3	4	3	3	3	4	31
1.	WT Optimalkan koordinasi dengan dinas/instansi terkait untuk mengatasi sering terjadinya	3	2	3	4	3	3	3	3	3	27	VI

	perubahan kebijakan pemerintah														
2.	Tingkatkan keterlibatan masyarakat untuk mengatasi kurangnya data yang valid untuk perencanaan	3	3	2	2	3	2	3	2	3	23	VIII			

Strategi yang ditempuh untuk mewujudkan tujuan yang ingin dicapai oleh tersebut diatas adalah sebagai berikut :

1. memanfaatkan dukungan dari pimpinan untuk membuat perencanaan yang akuntabel;
2. optimalkan koordinasi dengan dinas/instansi terkait untuk membuat perencanaan yang komprehensif;
3. meningkatkan keterlibatan stakeholders dalam proses perencanaan;
4. kembangkan mekanisme dan manfaatkan adanya sarana prasarana untuk mendukung kesadaran arati penting perencanaan pembangunan.

Kemudian strategi substantif penunjang proses dan mekanisme perencanaan yaitu:

A) peningkatan kapasitas dan kualitas kebijakan perencanaan pembangunan;

1. pengembangan manajemen dan mekenisme proses perencanaan pembangunan.

## **BAB V**

### **RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF**

#### **5.1 .A. Rencana Program**

Rencana Program yang dilaksanakan kelurahan Bojongbata meliputi :

1. Program pelayanan administrasi perkantoran;
2. Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur;
3. Program peningkatan pengembangan system pelaporan capaian kinerja dan keuangan;
4. Program mengintensifkan penanganan pengaduan masyarakat;
5. Program perencanaan pembangunan daerah.

#### **B. Rencana Kegiatan**

Rencana Kegiatan yang dilaksanakan Kelurahan Bojongbata meliputi :

1. Program pelayanan administrasi perkantoran;
  - a. Penyediaan jasa surat menyurat;
  - b. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik,
  - c. Penyediaan jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas / operasional;
  - d. Penyediaan jasa kebersihan kantor;
  - e. Penyediaan alat tulis kantor;
  - f. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan;
  - g. Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor;
  - h. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang - undangan;
  - i. Penyediaan makanan dan minuman;
  - j. Penyediaan jasa keamanan.

2. Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur;
  - a. Pengadaan mebeleur;
  - b. Pengadaan computer dan perlengkapannya;
  - c. Pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor;
  - d. Pengadaan alat-alat elektronik
  - e. Pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas / operasional;
  - f. Pemeliharaan rutin / berkala peralatan gedung kantor;
  - g. Pemeliharaan rutin / berkala mebeleur;
  - h. Pemeliharaan rutin / berkala computer dan perlengkapannya.
  - i. Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor
  
3. Program peningkatan pengembangan system pelaporan capaian kinerja dan keuangan;
  - a. Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD.
  
4. Program mengintensifkan penanganan pengaduan masyarakat;
  - a. Koordinasi kecamatan dan desa / kelurahan.
  
5. Program perencanaan pembangunan
  - a. Fasilitas kerjasama dengan dunia usah/lembaga
  - b. Penyelenggaraan musrenbang kecamatan / kelurahan.
  
6. Program rehabilitasi/jalan jembatan
  - a. Pebaikan jalan/gang aspal

## **5.2 Indikator Kinerja**

1. Program pelayanan administrasi perkantoran;
  - a. Terpenuhinya surat yang disampaikan dengan baik dan benar;
  - b. Tersedianya kebutuhan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik;
  - c. Tersedianya kendaraan dinas siap pakai tyang membutuhkan perpanjangan izinnya;

- d. Tersedianya tenaga kebersihan yang dibutuhkan;
  - e. Terpenuhiya alat tulis kantor;
  - f. Tersedianya penggandaan;
  - g. Terpenuhiya peralatan listrik yang disediakan;
  - h. Terpenuhiya buku / surat kabar;
  - i. Terpenuhiya kegiatan rapat / kegiatan lain yang memadai;
  - j. Tersedianya kebutuhan jasa keamanan.
2. Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur;
- a. Terpenuhiya kebutuhan mebeleur;
  - b. Terpenuhiya kebutuhan computer;
  - c. Terpeliharanya gedung kantor;
  - d. Terpenuhiya alat-alat elektronik
  - e. Tersedianya kendaraan dinas yang siap pakai;
  - f. Tersedianya peralatan gedung kantor yang berfungsi dengan baik;
  - g. Terpeliharanya mebeleur yang dapat dipakai dengan layak;
  - h. Terpeliharanya computer yang dapat berfungsi untuk kegiatan operasional.
  - i. Terpenuhi rehab sedang/berat gedung kantor
3. Program peningkatan pengembangan system pelaporan capaian kinerja dan keuangan;
- a. Tersusunya laporan kinerja SKPD.
4. Program mengintensifkan penanganan pengaduan masyarakat;
- a. terselesaikannya permasalahan / pengaduan masyarakat yang ditangani.
5. Program perencanaan pembangunan
- a. Terpenuhiya kerjasama dengan dunia usaha/lembaga
  - b. Tersusunya dokumen perencanaan dan hasil musrenbang kecamatan.
6. Program rehabilitasi/jalan jembatan
- a. Terpenuhiya pengaspalan jalan

### **1.3 Pendanaan Indikatif**

Kerangka pendanaan indikatif pada tahun 2011 - 2015 diprediksi dari proporsi alokasi anggaran masing - masing program. Besarnya alokasi belanja langsung Kelurahan Bojongbata pada tahun 2011 - 2015 diprediksikan meningkat sebesar 10 % pertahun. Perincian alokasi pendanaan indikatif masing - masing program pada tahun 2011 - 2015 yang akan datang adalah sebagai berikut :

LampiranTabelV.1

Alokasi Pendanaan Indikatif masing masing program Kelurahan Bojongbata Tahun 2011 - 2015.

Tabel V.1  
Alokasi Pendanaan Indikatif masing masing program  
Kelurahan Bojongsata Tahun 2011 – 2015.

NO	Uraian	Tahun				
		2011	2012	2013	2014	2015
	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	<b>36.803.000</b>	<b>54.864,000</b>	<b>44.540.100</b>	<b>48.994.110</b>	<b>53.893.521</b>
1	Penyediaan jasa administrasi surat menyurat	2,000,000	3,500.000	5.002.140	5.502.354	6.052.589
2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik.	3.000.000	2.000.000	3.630.000	3.993.000	4.392.300
3	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas / operasional.	400.000	1,400.000	605.000	665.500	732.050
4	Penyediaan alat tulis kantor.	5,100.000	7.200.000	1.464.100	1.610.510	1.771.561
5	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan.	1.077.000	4.900,000	2.346.190	2.580.809	2.838.890
6	Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor.	2,214.000	3,000,000	736.890	810.579	891.637
7	Penyediaan makanan dan minuman.	16.112.000	21,064,000	10.706.080	11.776.688	12.954.357
8	Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur					
9	Pemeliharaan rutin/berkala komputer dan perlengkapannya		2,440,000			
10	Pemeliharaan rutin/berkala alat-alat elektronika					
11	Penyediaan jasa kebersihan kantor					
12	Penyediaan jasa keamanan.	6.900.000	11,800,000	11.616.000	12.777.600	14.055.360

	<b>Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur</b>	<b>32.590.000</b>	<b>88,240,000</b>	<b>30.529.389</b>	<b>33.582.328</b>	<b>36.946.561</b>
13	Pengadaan mebeleur.	6,850.000	7,600,000	5.159.440	5.675.384	6.244.922
14	Pengadaan computer dan perlengkapannya.	15.000.000	10.000.000	6.050.000	6.655.000	7.320.500
15	Pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor.	4,5.000.000	4,500,000	13.266.440	14.593.084	16.052.392
16	Pengadaan alat-alat elektronik	3,800,000	11,200,000			
17	Pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas / operasional.	1.440.000	3,500,000	1.765.390	1.941.929	2.136.122
18	Pemeliharaan rutin / berkala komputer dan perlengkapannya	1.000.000	2,440.000	1.464.100	1.610.510	1.771.561
19	Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor		49,000,000			
	<b>Program peningkatan disiplin Aparatur</b>	729.000	11,200,000	882.090	970.299	1.067.329
20	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	1.459.000	6,400,000	1.941.929	2.136.122	2.349.734
21	Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu		4,800,000			
	<b>Program peningkatan pengembangan system pelaporan capaian kinerja dan keuangan.</b>	<b>2.180.000</b>	<b>7,500,000</b>	<b>2.901.580</b>	<b>3.191.738</b>	<b>3.510.912</b>
22	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	2.180.000	7,500,000	2.901.580	3.191.738	3.510.912
	<b>Program meningkatkan penanganan pengaduan masyarakat</b>	<b>14.791.000</b>	<b>20,350,000</b>	<b>19.686.821</b>	<b>21.655.503</b>	<b>23.821.053</b>
23	Koordinasi kecamatan dan desa / kelurahan.	14.791.000	20,350,000	19.686.821	21.655.503	23.821.053

	<b>perencanaan pembangunan</b>	<b>4.849.000</b>	<b>12,000,000</b>	<b>6.454.019</b>	<b>7.099.040</b>	<b>7.899.363</b>
	<b>Program kerjasama pembsngunsn</b>		<b>4,000,000</b>			
24	Fasilitas kerjasama dengan dunia usaha/lembaga		4,000,000			
	<b>Program Perencanaan pembangunan Daerah</b>		<b>8,000,000</b>			
25	Penyelenggaraan musrenbang kecamatan / kelurahan.	4.849.000	8,000,000	6.454.019	7.099.421	7.809.363
	<b>JUMLAH</b>	<b>83.840.000</b>	<b>94.784.690</b>	<b>104.263.159</b>	<b>114.689.475</b>	<b>126.158.422</b>

**BAB VI**  
**INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN**  
**DAN SASARAN RPJMD**

**6.1 Urusan Penataan Ruang**

Indikator dan capaian masing-masing program pada urusan penataan ruang tahun 2010 adalah sebagai berikut :

- a. Program Perencanaan Tata Ruang dengan indikator :
  - Tersusunnya dokumen revisi RTRW Kabupaten yang disesuaikan dengan UU dan peraturan pemerintah terbaru sebanyak 1 dokumen Perda
  - Ditetapkannya kebijakan tentang RDTRK, RTRK, dan RTBL kawasan strategis sesuai dengan RTRW Revisi (3 kecamatan)
- b. Program Pemanfaatan Ruang, dengan indikator :
  - 80% pemanfaatan ruang sesuai dengan Perda Tata Ruang Kabupaten (RTRW).
- c. Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang, dengan indikator :
  - Terbentuknya lembaga pengendali pemanfaatan ruang.
  - Tersusunnya prosedur dan manual pengendalian pemanfaatan ruang

**6.2. Urusan Perencanaan Pembangunan**

Indikator dan capaian masing-masing program pada urusan perencanaan pembangunan tahun 2010 adalah sebagai berikut :

- a. Program Pengembangan Data/Informasi, dengan indikator :
  - 80% data dan informasi pendukung perencanaan pembangunan yang bersifat komprehensif, lengkap dan up to date tersedia
- b. Program Kerjasama Pembangunan, dengan indikator :
  - Kerjasama pembangunan dengan kabupaten/kota sekitar
  - Terciptanya inisiasi kerjasama dengan stakeholders terkait (Perguruan Tinggi, Lembaga Penelitian, Lembaga lain) 50%
- c. Program Pengembangan wilayah perbatasan, dengan indikator :
  - 75% wilayah perbatasan berkembang

- d. Program Perencanaan Pengembangan Wilayah strategis dan cepat tumbuh, dengan indikator :
- 75% pusat-pusat pertumbuhan di Kab. Pematang Jaya berkembang
- e. Program Perencanaan Pengembangan Kota-kota menengah dan besar, dengan indikator :
- Berkembangnya kota-kota kecamatan seperti Comal, Randusongkal, Belik, Taman, Petarukan, Moga (60%).
- f. Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan Pembangunan Daerah, dengan indikator :
- Kapasitas Kelembagaan Perencanaan pembangunan daerah meningkat 75%
- g. Program Perencanaan Pembangunan Daerah dengan indikator :
- Tersusunnya dokumen rencana seperti Renja SKPD, Renstra SKPD, RKPD, RPJMD dan RPJP Daerah 100%
- h. Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi, dengan indikator :
- Tersusunnya dokumen rencana pembangunan sosial dan budaya 80%
- i. Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumberdaya Alam, dengan indikator :
- Tersusunnya dokumen Rencana induk pengembangan prasarana wilayah dan sumberdaya alam
- j. Program Perencanaan Pembangunan Daerah Rawan Bencana, dengan indikator :
- Tersusunnya dokumen rencana induk pembangunan daerah rawan bencana
- k. Program Optimalisasi Penelitian dan Pengembangan, dengan indikator :
- Terselenggaranya kegiatan penelitian yang melibatkan masyarakat dalam bentuk dokumen dan fasilitasi Kuliah Kerja Nyata.

## **BAB VII**

### **PENUTUP**

Rencana Strategik Kelurahan Bojongbata Kec.Pemalang Kabupaten Pemalang tahun 2011–2016 merupakan panduan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di bidang perencanaan pembangunan daerah selama kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan. Dokumen perencanaan pembangunan ini memiliki kedudukan yang sangat strategis karena dokumen ini merupakan roh penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di bidang perencanaan pembangunan yang akan dilaksanakan dan menentukan kinerja Kelurahan Bojongbata di masa-masa mendatang.

Ditengah keterbatasan potensi sumber daya pembangunan yang dimiliki Kelurahan Bojongbata, maka keterlibatan dan peran serta seluruh masyarakat dan stakeholder lainnya diharapkan akan semakin meningkatkan efisiensi pendayagunaan sumber daya yang ada.

Rencana strategis Kelurahan Bojongbata memuat rumusan visi, misi, arah kebijakan dan rencana program dan kegiatan indikatif yang akan dilaksanakan selama periode lima tahun yang akan datang. Oleh karena sifatnya masih indikatif maka setiap kegiatan yang dilaksanakan disesuaikan dengan pembiayaan/anggaran yang tersedia.

LURAH BOJONGBATA  
KABUPATEN PEMALANG



IMAN HIDAYAT, B.Sc  
Penata tingkat I  
NIP.19581222 198903 1 006